



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 7846-7854

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Belanja Pemerintah dan Investasi Daerah terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bengkulu

Della Agustin, Pakri Fahmi, Fitriani Ariska

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu

agustinnndellaa@gmail.com, pakhrifahmi@gmail.com, fitrianiariska20@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effect of regional government expenditure and regional investment on the growth of the Constant Price Gross Regional Domestic Product (GRDP) of Bengkulu Province during the 2010–2024 period. The main problem underpinning this research is the suboptimal utilization of government expenditure in driving productive sectors and the relatively low investment attractiveness in Bengkulu Province. This study employs a quantitative method with a causal associative approach. The research population covers all data on regional government expenditure, regional investment, and constant-price GRDP of Bengkulu Province. The sample was determined through purposive sampling, yielding 14 observations for the 2010–2024 period (excluding 2020 due to Covid-19 pandemic distortions). Secondary data were obtained from BPS, BPKAD, and DPMPTSP of Bengkulu Province. The independent variables are regional government expenditure (X_1) and regional investment (X_2), while the dependent variable is constant-price GRDP (Y). Multiple linear regression using EViews was employed, supplemented by classical assumption tests. The results show that government expenditure has a positive and significant effect on GRDP (prob. 0.0016; coefficient 4.181339), regional investment has a positive and significant effect (prob. 0.0007; coefficient 1.242175), and simultaneously both variables significantly affect GRDP (Prob. F-statistic = 0.000000). The R^2 value of 0.944851 indicates that 94.48% of GRDP variation is explained by these two variables. Improving government expenditure effectiveness and strengthening the investment climate are key strategies for promoting sustainable economic growth in Bengkulu Province.

Keywords: Regional Government Expenditure, Regional Investment, Economic Growth, GRDP, Bengkulu Province.

1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah lazimnya diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi yang beroperasi dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Dalam rangka mengukur pertumbuhan ekonomi secara riil, digunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) karena indikator ini mampu menggambarkan perubahan output nyata tanpa dipengaruhi oleh fluktuasi harga atau inflasi [1]. Peningkatan PDRB ADHK secara konsisten mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi yang berdampak langsung pada pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja, dan kemajuan pembangunan daerah.

Pertumbuhan PDRB dipengaruhi oleh sejumlah faktor strategis, di antaranya belanja pemerintah dan investasi daerah. Belanja pemerintah berfungsi sebagai instrumen fiskal utama untuk menyediakan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program pembangunan yang secara langsung meningkatkan produktivitas perekonomian. Sementara itu, investasi baik yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) bertujuan meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja baru, serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Teori Keynes menjelaskan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan permintaan agregat dan mendorong aktivitas produksi, sedangkan teori Harrod-Domar menegaskan bahwa investasi merupakan motor utama dalam meningkatkan kapasitas produksi jangka panjang [2].

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu daerah yang terus berupaya memacu pertumbuhan ekonominya melalui kebijakan pembangunan dan peningkatan investasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai PDRB

atas dasar harga berlaku Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 mencapai Rp103,99 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp54,45 triliun dengan laju pertumbuhan sebesar 4,62 persen [3]. Meskipun pertumbuhan tersebut cukup positif, Bengkulu masih menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan infrastruktur, rendahnya daya tarik investasi, dan belum optimalnya penyerapan belanja pemerintah untuk sektor-sektor produktif, yang menjadi hambatan bagi percepatan pembangunan ekonomi daerah.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara belanja pemerintah, investasi, dan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Siregar et al. [4] menemukan bahwa di Provinsi Sumatera Utara, belanja pemerintah dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. P dan Ananda [5] membuktikan hal serupa di Provinsi Papua, di mana belanja pemerintah dan investasi dalam negeri berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Zulvan dan Purbasari [6] mengonfirmasi bahwa investasi dan belanja modal berpengaruh positif serta signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali. Di tingkat Sumatera, Di et al. [7] menemukan bahwa pengeluaran pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Adapun Herita dan Yuhendri [8] yang secara khusus meneliti Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi secara simultan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Meskipun demikian, terdapat research gap yang signifikan dalam kajian-kajian terdahulu. Sebagian besar penelitian dilakukan di wilayah dengan karakteristik ekonomi yang berbeda dari Provinsi Bengkulu, dan penelitian khusus tentang Bengkulu masih menggunakan periode pengamatan yang relatif pendek sehingga belum dapat merepresentasikan dinamika ekonomi terkini. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penggunaan data time series yang lebih panjang, yaitu tahun 2010–2024 dengan pengecualian tahun 2020 akibat distorsi pandemi Covid-19, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan jangka panjang antara belanja pemerintah, investasi daerah, dan pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Bengkulu. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah dan investasi daerah, baik secara parsial maupun simultan, terhadap PDRB ADHK Provinsi Bengkulu periode 2010–2024, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan fiskal dan strategi investasi yang lebih efektif bagi pemerintah daerah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal, yaitu pendekatan yang bertujuan menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel bebas dan variabel terikat [9]. Penelitian dilaksanakan menggunakan data Provinsi Bengkulu sebagai objek penelitian, meliputi seluruh data fiskal daerah, realisasi investasi, dan perkembangan PDRB selama periode pengamatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi laporan resmi dan studi pustaka dari referensi akademik yang relevan.

2.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga variabel utama. Variabel dependen (Y) adalah Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Provinsi Bengkulu. Variabel independen terdiri dari dua variabel, yaitu Belanja Pemerintah Daerah (X_1) dan Investasi Daerah (X_2). Model regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = PDRB ADHK

X_1 = Belanja Pemerintah Daerah

X_2 = Investasi Daerah

β_0 = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi; ε = Error term.

2.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel PDRB ADHK (Y) diukur berdasarkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Bengkulu per tahun dalam satuan miliar rupiah, yang mencerminkan total nilai barang dan jasa yang diproduksi tanpa dipengaruhi fluktuasi harga. Variabel Belanja Pemerintah Daerah (X_1) dioperasionalkan sebagai total realisasi

belanja daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dinyatakan dalam miliar rupiah. Variabel Investasi Daerah (X_2) dioperasionalkan sebagai total nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) per tahun di Provinsi Bengkulu, dinyatakan dalam miliar rupiah. Seluruh variabel dianalisis menggunakan skala rasio.

2.3 Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data Belanja Pemerintah Daerah, Investasi Daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Bengkulu sepanjang periode waktu yang relevan. Data tersebut mencerminkan kondisi perekonomian daerah serta peran kebijakan fiskal dan investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu.

2.4 Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria ketersediaan dan kelengkapan data resmi yang dipublikasikan oleh instansi pemerintah. Sampel yang digunakan adalah data time series periode 2010–2024, dengan pengecualian tahun 2020 yang dikeluarkan karena adanya distorsi ekonomi yang tidak lazim akibat pandemi Covid-19, sehingga total observasi yang dianalisis berjumlah 14 tahun. Kriteria penetapan sampel meliputi: (1) data realisasi belanja pemerintah daerah yang tercantum dalam laporan APBD Provinsi Bengkulu; (2) data investasi daerah yang mencakup realisasi PMDN dan PMA; dan (3) data PDRB ADHK Provinsi Bengkulu yang tersedia secara lengkap dan konsisten selama periode pengamatan.

Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik yang mencakup: (1) uji normalitas menggunakan metode Jarque-Bera untuk memastikan residual berdistribusi normal; (2) uji multikolinearitas dengan memeriksa matriks korelasi antar variabel independen, di mana nilai korelasi di atas 0,90 mengindikasikan adanya multikolinearitas; (3) uji heteroskedastisitas menggunakan White Test, dengan dasar keputusan nilai Prob. Chi-Square > 0,05 berarti tidak terjadi heteroskedastisitas; dan (4) uji autokorelasi menggunakan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test, di mana Prob. Chi-Square > 0,05 menunjukkan tidak ada autokorelasi. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t parsial dan uji F simultan pada tingkat signifikansi 5%, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Deskripsi Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berbentuk time series Provinsi Bengkulu untuk periode 2010–2024, tidak termasuk tahun 2020. Tabel 1 menyajikan perkembangan belanja pemerintah, investasi daerah, dan PDRB ADHK Provinsi Bengkulu secara lengkap selama periode penelitian.

Tabel 1. Data Belanja Pemerintah, Investasi Daerah, dan PDRB ADHK Provinsi Bengkulu Tahun 2010–2024

Tahun	Belanja Pemerintah (Miliar Rp)	Investasi Daerah (Miliar Rp)	PDRB ADHK (Miliar Rp)
2010	0,971	236,46	28.352,57
2011	1.009,22	378,19	30.295,05
2012	1.518,45	337,75	32.363,04
2013	1.727,01	342,86	34.326,37
2014	1.934,72	248,70	36.207,15
2015	2.282,34	838,08	38.066,01
2016	2.029,69	1.697,49	40.076,54
2017	2.867,21	2.175,61	42.073,52
2018	2.979,58	7.026,55	44.171,16

2019	3.118,30	7.470,96	46.345,45
2021	3.056,48	5.261,68	47.853,78
2022	3.026,39	7.778,46	49.916,06
2023	3.123,41	8.391,86	52.051,56
2024	3.140,47	9.383,75	54.454,65

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, BPKAD, DPMTSP Provinsi Bengkulu (diolah)

Berdasarkan Tabel 1, PDRB ADHK Provinsi Bengkulu menunjukkan tren yang terus meningkat dari 28.352,57 miliar rupiah pada tahun 2010 menjadi 54.454,65 miliar rupiah pada tahun 2024, mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil yang konsisten selama periode pengamatan. Belanja pemerintah daerah juga menunjukkan kecenderungan meningkat dari 0,971 miliar rupiah (2010) hingga 3.140,47 miliar rupiah (2024), meskipun sempat mengalami fluktuasi pada tahun 2016 dan 2022. Sementara itu, investasi daerah memperlihatkan pola yang lebih dinamis, dengan pertumbuhan paling signifikan terjadi setelah tahun 2015 ketika realisasi investasi mulai meningkat pesat dari 838,08 miliar rupiah menjadi 9.383,75 miliar rupiah pada tahun 2024. Perkembangan ketiga variabel secara umum menunjukkan pola yang searah, di mana peningkatan belanja pemerintah dan investasi daerah berjalan beriringan dengan pertumbuhan PDRB, mengindikasikan adanya hubungan yang erat antara ketiga variabel tersebut.

3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan menggunakan metode Jarque-Bera untuk memastikan bahwa residual model regresi terdistribusi secara normal, sebagai salah satu syarat dasar dalam penggunaan regresi linier berganda. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas (Jarque-Bera)

Uji	Hasil
Metode	Jarque-Bera
Nilai Probabilitas	0,520742
Kesimpulan	Residual terdistribusi normal (Prob. > 0,05)

Sumber: Output EViews (diolah)

Berdasarkan Tabel 2, hasil uji Jarque-Bera menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,520742 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Berdasarkan kriteria pengujian, nilai probabilitas > 0,05 menunjukkan bahwa residual model terdistribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Dengan terpenuhinya asumsi ini, estimasi regresi yang dihasilkan dapat dikatakan memenuhi sifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis selanjutnya.

3.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya hubungan linear yang kuat di antara variabel-variabel independen dalam model. Apabila terdapat multikolinearitas yang tinggi, koefisien regresi yang dihasilkan akan menjadi tidak stabil dan sulit diinterpretasikan secara akurat. Hasil uji disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas (Matriks Korelasi)

Variabel	BP	ID
BP (Belanja Pemerintah)	1,000000	0,793321
ID (Investasi Daerah)	0,793321	1,000000
Kesimpulan	Korelasi 0,793321 < 0,90 → Tidak terjadi multikolinearitas	

Sumber: Output EViews (diolah)

Berdasarkan Tabel 3, nilai korelasi antara variabel belanja pemerintah (BP) dan investasi daerah (ID) adalah sebesar 0,793321. Nilai ini berada jauh di bawah ambang batas 0,90 yang menjadi standar deteksi multikolinearitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas yang signifikan dalam model. Hal ini berarti kedua variabel independen masih memiliki variasi yang cukup untuk menjelaskan perubahan PDRB secara terpisah, dan estimasi koefisien regresi yang dihasilkan dapat dikatakan valid dan tidak bias akibat masalah kolinearitas.

3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah varians residual dalam model regresi bersifat konstan (homoskedastisitas) atau berubah-ubah (heteroskedastisitas). Keberadaan heteroskedastisitas dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi yang tidak efisien. Pengujian dilakukan menggunakan White Test dengan hasil yang disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas (White Test)

Heteroskedasticity Test: White	Nilai	Probabilitas
F-statistic	1,181285	Prob. F(5,8) = 0,3963
Obs*R-squared	5,946168	Prob. Chi-Square(5) = 0,3115
Scaled explained SS	3,147293	Prob. Chi-Square(5) = 0,6773
Kesimpulan	Prob. Chi-Square = 0,3115 > 0,05 → Tidak terjadi heteroskedastisitas	

Sumber: Output EViews (diolah)

Berdasarkan Tabel 4, hasil White Test menunjukkan nilai Prob. Chi-Square (Obs*R-squared) sebesar 0,3115, jauh di atas ambang batas 0,05. Dengan demikian, keputusan yang diambil adalah tidak menolak hipotesis nol yang menyatakan tidak terdapat heteroskedastisitas. Artinya, varians residual dalam model bersifat konstan (homoskedastisitas), sehingga model regresi memenuhi salah satu asumsi penting dalam analisis OLS dan estimasi yang dihasilkan bersifat efisien.

3.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi antara residual dari satu periode dengan periode lainnya dalam data time series. Autokorelasi dapat menyebabkan estimasi yang tidak efisien dan pengujian hipotesis yang tidak valid. Pengujian menggunakan metode Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test dengan hasil sebagaimana Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi (Breusch-Godfrey LM Test)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test	Nilai	Probabilitas
F-statistic	0,963175	Prob. F(2,9) = 0,4178
Obs*R-squared	2,468245	Prob. Chi-Square(2) = 0,2911
Kesimpulan	Prob. Chi-Square = 0,2911 > 0,05 → Tidak terjadi autokorelasi	

Sumber: Output EViews (diolah)

Berdasarkan Tabel 5, nilai Prob. Chi-Square (Obs*R-squared) sebesar 0,2911 yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi. Dengan terpenuhinya seluruh uji asumsi klasik—normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi—dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi syarat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) sehingga hasil estimasi yang diperoleh sah untuk dilanjutkan ke tahap pengujian hipotesis.

3.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah seluruh asumsi klasik terpenuhi, dilakukan estimasi model regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh belanja pemerintah daerah dan investasi daerah terhadap PDRB ADHK Provinsi Bengkulu. Hasil estimasi disajikan secara lengkap pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C (Konstanta)	2.710.238	171.656,6	15,78872	0,0000
BP (Belanja Pemerintah)	4,181339	1,005099	4,160125	0,0016
ID (Investasi Daerah)	1,242175	0,266311	4,664384	0,0007
R-squared	0,944851	Adjusted R-squared	0,934824	
F-statistic	94,22991	Prob(F-statistic)	0,000000	
Durbin-Watson stat	0,877866	S.E. of regression	211.836,8	

Sumber: Output EViews (diolah)

Berdasarkan Tabel 6, persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 2.710.238 + 4,181339 X_1 + 1,242175 X_2$$

Nilai konstanta sebesar 2.710.238 mengindikasikan bahwa apabila belanja pemerintah daerah dan investasi daerah bernilai nol, maka PDRB Provinsi Bengkulu diperkirakan sebesar 2.710.238 miliar rupiah. Koefisien belanja pemerintah sebesar 4,181339 berarti setiap kenaikan satu miliar rupiah belanja pemerintah akan meningkatkan PDRB sebesar 4,181339 miliar rupiah, dengan asumsi variabel lain konstan. Adapun koefisien investasi daerah sebesar 1,242175 berarti setiap kenaikan satu miliar rupiah investasi daerah akan meningkatkan PDRB sebesar 1,242175 miliar rupiah, ceteris paribus. Nilai Durbin-Watson sebesar 0,877866 yang telah terkonfirmasi bebas autokorelasi melalui uji BG LM mendukung keandalan model ini.

3.4 Hasil Uji t (Parsial)

Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pada Tabel 6, variabel belanja pemerintah daerah (BP) memperoleh nilai t-statistic sebesar 4,160125 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0016. Karena nilai probabilitas 0,0016 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Provinsi Bengkulu. Hipotesis pertama (H_{1a}) yang menyatakan bahwa belanja pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap PDRB dengan demikian diterima.

Variabel investasi daerah (ID) memperoleh nilai t-statistic sebesar 4,664384 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0007. Nilai probabilitas tersebut jauh lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, sehingga investasi daerah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Provinsi Bengkulu. Hipotesis kedua (H_{2a}) yang menyatakan bahwa investasi daerah berpengaruh signifikan terhadap PDRB pun diterima. Besarnya nilai t-statistic investasi daerah (4,664384) yang melampaui nilai t-statistic belanja pemerintah (4,160125) mengindikasikan bahwa pada periode penelitian ini, kontribusi investasi daerah terhadap PDRB secara parsial sedikit lebih kuat dibandingkan belanja pemerintah.

3.5 Hasil Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 6, nilai F-statistic sebesar 94,22991 dengan nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,000000. Karena nilai Prob(F-statistic) = 0,000000 jauh lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintah daerah dan investasi daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap PDRB Provinsi Bengkulu. Hipotesis ketiga (H_{3a}) yang menyatakan pengaruh simultan kedua variabel terhadap PDRB dengan demikian diterima.

Nilai F-statistic yang sangat besar (94,22991) menunjukkan bahwa model yang dibangun sangat baik dalam menjelaskan variasi PDRB. Hal ini mengindikasikan bahwa kombinasi kebijakan fiskal melalui belanja pemerintah yang produktif dan peningkatan realisasi investasi daerah merupakan faktor determinan yang sangat kuat dalam menentukan besaran PDRB Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun.

3.6 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,944851 menunjukkan bahwa sebesar 94,48% variasi PDRB ADHK Provinsi Bengkulu dapat dijelaskan oleh variabel belanja pemerintah daerah dan investasi daerah secara bersama-sama. Hanya 5,52% variasi PDRB yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model, seperti tenaga kerja, tingkat inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, atau ekspor-impor daerah. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,934824 yang telah mempertimbangkan jumlah variabel prediktor dan jumlah observasi juga mengonfirmasi keandalan model. Kedua nilai ini secara bersama-sama menegaskan bahwa model regresi yang dibangun memiliki kemampuan prediktif yang sangat tinggi dalam menjelaskan pertumbuhan PDRB Provinsi Bengkulu selama periode 2010–2024.

3.7 Pembahasan

3.7.1 Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah terhadap PDRB Provinsi Bengkulu

Hasil uji t menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Provinsi Bengkulu, dengan koefisien 4,181339 dan probabilitas 0,0016. Temuan ini membuktikan bahwa setiap peningkatan belanja pemerintah daerah akan secara nyata mendorong pertumbuhan nilai tambah ekonomi daerah. Dari sisi teoritis, hasil ini selaras dengan teori ekonomi publik yang menempatkan pemerintah sebagai aktor kunci dalam mengalokasikan sumber daya, menyediakan barang publik, dan mendorong aktivitas ekonomi melalui kebijakan fiskal [10]. Belanja pemerintah yang dialokasikan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya terbukti mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang mengangkat nilai PDRB secara keseluruhan.

Dalam konteks Provinsi Bengkulu, realisasi belanja pemerintah daerah selama periode penelitian menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 0,971 miliar rupiah (2010) menjadi 3.140,47 miliar rupiah (2024). Peningkatan belanja tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperluas cakupan dan kualitas layanan publik serta membangun infrastruktur yang menjadi prasyarat bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi. Pengeluaran produktif pemerintah yang diarahkan pada sektor-sektor yang berdampak luas bagi masyarakat terbukti mampu meningkatkan daya dukung perekonomian daerah secara signifikan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Siregar et al. [4] di Provinsi Sumatera Utara, penelitian Herita dan Yuhendri [8] yang khusus mengkaji Bengkulu, serta penelitian Sari et al. [11] di Provinsi Lampung yang seluruhnya mengonfirmasi pengaruh positif dan signifikan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kesamaan hasil lintas wilayah ini memperkuat bukti empiris bahwa kebijakan fiskal yang diorientasikan pada belanja produktif merupakan instrumen yang sangat efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

3.7.2 Pengaruh Investasi Daerah terhadap PDRB Provinsi Bengkulu

Hasil uji t menunjukkan bahwa investasi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Provinsi Bengkulu, dengan koefisien 1,242175 dan probabilitas 0,0007. Nilai probabilitas yang sangat kecil ini menunjukkan keyakinan statistik yang tinggi bahwa peningkatan realisasi investasi daerah memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan PDRB. Temuan ini sejalan dengan teori investasi Modigliani dan Miller yang menyatakan bahwa investasi yang masuk ke suatu wilayah akan meningkatkan kapasitas produksi daerah, memperluas kegiatan ekonomi, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru [12]. Teori pertumbuhan endogen Romer juga mendukung temuan ini dengan menjelaskan bahwa investasi tidak hanya menambah stok modal fisik, tetapi juga mendorong inovasi dan peningkatan teknologi yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang [13].

Data penelitian menunjukkan bahwa realisasi investasi daerah di Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, dari 236,46 miliar rupiah (2010) menjadi 9.383,75 miliar rupiah (2024), atau meningkat hampir 40 kali lipat selama periode pengamatan. Lonjakan yang paling signifikan terjadi setelah tahun 2015, ketika realisasi PMDN dan PMA mulai meningkat dramatis sejalan dengan berbagai kebijakan kemudahan investasi di tingkat

nasional maupun daerah. Masuknya investasi ke berbagai sektor ekonomi Bengkulu terbukti mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada gilirannya mendorong peningkatan PDRB secara signifikan. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Patanduk et al. [14] di Provinsi Sulawesi Utara, Zulvan dan Purbasari [6] pada kabupaten/kota di Jawa dan Bali, serta Herita dan Yuhendri [8] di Bengkulu yang seluruhnya membuktikan bahwa investasi merupakan faktor determinan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi regional.

3.7.3 Pengaruh Simultan Belanja Pemerintah Daerah dan Investasi Daerah terhadap PDRB

Hasil uji F dengan nilai $\text{Prob}(F\text{-statistic}) = 0,000000$ dan $F\text{-statistic} = 94,22991$ membuktikan secara meyakinkan bahwa belanja pemerintah daerah dan investasi daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Provinsi Bengkulu. Nilai R^2 sebesar 0,944851 menegaskan bahwa 94,48% variasi PDRB selama periode penelitian dapat diterangkan oleh kombinasi kedua variabel tersebut, menjadikan model ini sangat representatif dalam menangkap determinan utama pertumbuhan ekonomi Bengkulu.

Secara teoritis, hasil ini mendukung teori pertumbuhan Solow yang menekankan bahwa akumulasi modal—baik melalui investasi publik (belanja pemerintah) maupun investasi swasta—merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi [1]. Barro [15] juga mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah yang produktif menciptakan ekosistem yang kondusif bagi investor dengan menyediakan infrastruktur dan stabilitas ekonomi yang dibutuhkan. Sinergi antara belanja pemerintah yang memperkuat fondasi ekonomi dan investasi daerah yang meningkatkan kapasitas produksi sektor swasta menciptakan multiplier effect yang jauh lebih besar dibandingkan jika masing-masing variabel bekerja secara parsial. Inilah yang menjelaskan tingginya nilai R^2 dalam model penelitian ini.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Siregar et al. [4], Di et al. [7], P dan Ananda [5], serta Herita dan Yuhendri [8] yang seluruhnya menemukan pengaruh simultan yang positif dari belanja pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai provinsi di Indonesia. Bukti empiris yang lintas wilayah dan lintas periode ini secara kolektif menunjukkan bahwa strategi pembangunan yang memadukan ekspansi fiskal yang berkualitas dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif merupakan pendekatan yang paling efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bagi Provinsi Bengkulu yang masih berada dalam tahap pengembangan, kombinasi kedua faktor ini menjadi kunci dalam mempercepat transformasi struktur ekonomi menuju perekonomian yang lebih produktif dan berdaya saing.

4. Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa belanja pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB ADHK Provinsi Bengkulu dengan nilai probabilitas sebesar 0,0016 dan koefisien regresi sebesar 4,181339, yang berarti setiap peningkatan belanja pemerintah secara konsisten mendorong pertumbuhan nilai tambah ekonomi daerah. Investasi daerah juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB dengan probabilitas sebesar 0,0007 dan koefisien sebesar 1,242175, mengonfirmasi bahwa peningkatan realisasi PMDN dan PMA memberikan kontribusi nyata bagi ekspansi perekonomian Bengkulu. Secara simultan, kedua variabel bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PDRB dengan $\text{Prob}(F\text{-statistic}) = 0,000000$ dan $F\text{-statistic} = 94,22991$, sedangkan nilai R^2 sebesar 0,944851 menunjukkan bahwa 94,48% variasi PDRB selama periode 2010–2024 dapat dijelaskan oleh model ini. Implikasi akademis dari penelitian ini adalah menambah bukti empiris yang memperkuat relevansi teori ekonomi publik dan teori investasi dalam konteks daerah berkembang di Indonesia. Sinergi antara kebijakan fiskal yang berorientasi pada belanja produktif dan peningkatan investasi terbukti menciptakan multiplier effect yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi regional. Secara praktis, Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu mengalokasikan belanja daerah secara lebih besar dan terarah pada sektor-sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang terbukti memiliki dampak berganda terhadap perekonomian. Di sisi investasi, upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi perizinan, peningkatan kepastian hukum, serta penyediaan infrastruktur pendukung investasi perlu terus diperkuat agar realisasi PMDN dan PMA di Provinsi Bengkulu dapat tumbuh secara berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan variabel dengan memasukkan faktor-faktor lain yang berpotensi mempengaruhi PDRB, seperti tenaga kerja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat inflasi, atau nilai ekspor daerah, guna menghasilkan model yang lebih komprehensif. Penggunaan metode analisis yang lebih canggih seperti Vector Error Correction Model (VECM) atau analisis data panel lintas kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu juga direkomendasikan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka panjang.

Referensi

- [1] R. Solow, "A Contribution to the Theory of Economic Growth," *Quarterly Journal of Economics*, vol. 70, no. 1, pp. 65–94, 1956.
- [2] M. A. Adhim, M. W. Dewi, dan Y. A. Pravasanti, "Analisis Pengaruh Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Pembiayaan Daerah Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Tahun 2016-2018)," *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, vol. 3, no. 2, pp. 540–550, 2024. <https://jurnal.jiemap.net/index.php/jikab/article/view/85>
- [3] Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bengkulu Menurut Pengeluaran 2020–2024*, BPS Provinsi Bengkulu, Bengkulu, 2025.
- [4] F. A. Siregar, J. Suharianto, D. N. Putri, A. Putri, dan C. M. Manurung, "Pengaruh Belanja Pemerintah & Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara Periode 2004–2023," *Journal of Social Science Research*, vol. 4, no. 6, pp. 7256–7266, 2024.
- [5] G. I. K. B. P dan C. F. Ananda, "Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, IPM, dan Investasi Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua," *Jdess*, vol. 3, no. 4, pp. 1042–1056, 2024.
- [6] M. F. Zulvan dan H. Purbasari, "Pengaruh Investasi, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi," *Jurnal EMT KITA*, vol. 8, no. 1, pp. 175–186, 2024. <https://doi.org/10.35870/emt.v8i1.2095>
- [7] M. F. Ihsani, K. A. Reksabil, M. Muluk, dan D. A. Putra, "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat," *YUME: Journal of Management*, vol. 8, no. 2, pp. 1702–1716, 2025.
- [8] M. F. Herita dan L. V. Yuhendri, "Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu Tahun 2016–2021," pp. 105–115, 2021.
- [9] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- [10] A. C. F. Safitri Meilissa Ike Dien dan Ferry Prasetyia, "Analisis Dampak Belanja Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Jawa Timur," *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, vol. 6, pp. 85–96, 2021.
- [11] W. Sari, P. Swastika, dan Y. Yunarti, "Pengaruh Belanja Pemerintah, Konsumsi Rumah Tangga, Indeks Pembangunan Manusia dan Ekspor terhadap PDRB di Provinsi Lampung Tahun 2014–2024," vol. 25, no. 1, pp. 22–36, 2025.
- [12] N. Panelewen, J. B. Kalangi, dan E. N. Walewangko, "Pengaruh Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Tenaga Kerja terhadap PDRB di Kota Manado," vol. 20, no. 1, pp. 124–133, 2020.
- [13] A. A. A. C. Suryantari dan I. G. B. Indrajaya, "Pengaruh Investasi, Belanja Modal, dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali," 2018.
- [14] C. Y. Patanduk, V. A. Rimate, dan A. T. Naukoko, "Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Belanja Pemerintah terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal EMBA*, vol. 7, no. 3, pp. 3988–3997, 2019.
- [15] R. J. Barro, "Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth," *Journal of Political Economy*, vol. 98, no. 5, pp. S103–S125, 1990.
- [16] T. M. Sabilla dan H. Sumarsono, "Pengaruh Belanja Pemerintah, PAD, PMDN, dan IPM terhadap PDRB," vol. 24, no. 1, pp. 54–64, 2022.
- [17] I. Primasari et al., "Pengaruh Belanja Daerah terhadap PDRB pada 8 Provinsi di Indonesia Tahun 2016–2022," vol. 16, no. 2, pp. 59–68, 2024.
- [18] M. A. Firdaus dan D. A. Suseno, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Investasi dan PDRB di Indonesia," vol. 4, no. 4, pp. 7243–7262, 2025.